



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 858 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 858 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

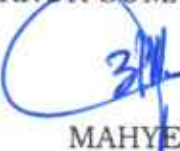
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Bukittinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bukittinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Bukittinggi menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Hams	Sekretaris Daerah	21/12	f
2		Asisten Administrasi Umum		
3	Rafael A.P.	Kepala BPKAD	21/12	ck
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	19/12	g
5	Afrizal Umar	Kasubid	19/12 23	3/2

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Desember 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - - 2023
TANGGAL Desember 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Wali Kota, meliputi:

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024	12 Tahun 2023	3 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2024 oleh Kepala Daerah Kepada DPRD (sesuai tanggal tanda terima dokumen dari DPRD/Setwan)	910/804/BK.03/2023	11 Juli 2023	Sesuai (paling lambat minggu II bulan Juli 2023)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA TA. 2024 antara Kepala Daerah dan DPRD	<u>180/05/HUK-E/2023</u> 170/01/NKB-DPRD/2023	9 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2023)
4	Kesepakatan Rancangan PPAS TA. 2024 antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi	<u>180/06/HUK-E/2023</u> 170/02/NKB-DPRD/2023	9 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2023)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD (sesuai tanggal tanda terima dokumen dari DPRD/Setwan)	910.1052/BK.03/2023	8 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September 2023)
6	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD TA. 2024	<u>180/15/HUK-E/2023</u> 170/08/NPB-DPRD/2023	30 November 2023	Sesuai (paling lambat tanggal 30 November 2023)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Ta. 2024 ke Gubernur untuk dievaluasi	910/1458/HK.03/2023	04 Desember 2023	Sesuai (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD pada tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 04 Desember 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 3

Juli 2023, **sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Wali Kota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Bukittinggi dengan DPRD Kota Bukittinggi terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 09 Agustus 2023, khusus untuk kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD Kota Bukittinggi **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh Wali Kota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 08 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kota Bukittinggi dengan Wali Kota Bukittinggi pada tanggal 30 November 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Bukittinggi agar menjaga konsistensi dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan akhir November 2023 sebesar Rp542.111.127.735,79 atau 73,89% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp744.059.199.525,66 atau 88,88% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 per 31 November 2023 sebesar Rp555.324.462.348,13 atau 68,47% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..
- d. belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
 - 1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
 - a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 - b) peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - 2) penurunan stunting antara lain:
 - a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
 - b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
 - c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
 - 3) pengendalian inflasi antara lain:
 - a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
 - b) pengendalian laju alih fungsi lahan.
 - c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
 - d) penguatan tata kelola logistik daerah.
 - e) pengawasan harga dan operasi pasar.

- 4) peningkatan investasi antara lain:
 - a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS).
 - b) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
 - 5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
 - 6) pembangunan infrastruktur; dan
 - 7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
 - e. Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
 - f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kota Bukittinggi memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
 - g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp756.734.447.755 mengalami penambahan sebesar Rp5.475.293.861 atau 1% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp751.259.153.894.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp153.160.514.484.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp603.573.933.271.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp602.426.957 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.160.514.484
Pajak Daerah	54.110.644.633
Retribusi Daerah	57.679.136.250
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308
Lain-lain PAD yang Sah	33.063.308.293
PENDAPATAN TRANSFER	492.812.127.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.883.484.530
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.690.448.741
Jumlah Pendapatan	756.734.447.755

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp153.160.514.484.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	APBD-P Tahun Anggaran 2022			%	APBD-P Tahun Anggaran 2023			%	Target RAPBD Tahun Anggaran 2024		Salah Target APBD-P TA 2023 dan Target RAPBD TA 2024	% Salah Target APBD-P TA 2023 dan Target RAPBD TA 2024	% dari Target RAPBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD-P TA 2023 per 10 Nov 2023
	(Rp)		Realisasi		(Rp)		Realisasi Per 10 Nov 2023		(Rp)	(Rp)			
	Target	2			Target	5							
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.237.791.455	130.796.925.184	95,99	443,2	137.413.206.479	103.818.158.351	75,65	746,5	153.180.514.484	15.747.305.005	11,46	147,53	147,53
Pajak Daerah	50.289.852.262	46.570.750.398	92,61	90,61	53.610.644.633	43.636.045.983	81,39	81,39	54.110.644.633	500.000.000	0,93	124,00	124,00
Pajak Hotel	16.132.300.000	16.203.159.613	100,44	100,44	17.332.300.000	14.209.709.940	81,98	81,98	16.480.700.000	-851.600.000	(4,91)	115,98	115,98
Pajak Restoran	8.532.186.156	6.907.203.972	80,95	80,95	10.054.424.206	6.163.303.854	61,30	61,30	9.249.300.000	-805.124.206	(8,01)	150,07	150,07
Pajak Hiburan	1.088.022.310	1.004.246.805	92,30	92,30	988.022.310	881.535.668	89,22	89,22	500.000.000	-488.022.310	(49,39)	56,72	56,72
Pajak Reklame	860.800.000	967.282.188	112,37	112,37	939.354.321	867.063.787	96,76	96,76	750.000.000	-249.354.321	(24,95)	86,50	86,50
Pajak Penerangan Jalan	8.074.338.220	6.268.267.602	103,19	103,19	6.224.338.220	5.502.250.955	88,40	88,40	5.905.000.000	-319.338.220	(5,13)	107,32	107,32
Pajak Parkir	400.000.000	322.475.568	80,62	80,62	400.000.000	209.066.700	52,27	52,27	200.000.000	-200.000.000	(50,00)	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	70.000.000	76.075.811	108,68	108,68	300.000.000	62.866.961	20,89	20,89	350.000.000	50.000.000	16,67	558,60	558,60
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.090.100.000	3.925.523.043	95,98	95,98	4.090.100.000	3.952.528.131	96,64	96,64	5.124.355.367	1.034.255.367	25,29	129,65	129,65
Beda Pembebanan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.022.105.576	13.896.515.886	106,71	106,71	13.222.105.576	11.787.929.897	89,15	89,15	15.551.289.286	2.329.183.690	17,62	131,93	131,93
Retribusi Daerah	48.684.034.000	46.662.398.969	95,85	95,85	51.990.255.000	33.334.554.630	64,12	64,12	57.679.136.250	5.688.877.250	10,94	173,03	173,03
Retribusi Pelayanan Kesehatan	550.000.000	709.272.000	128,96	128,96	550.000.000	409.487.000	74,45	74,45	641.341.250	91.341.250	16,61	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.550.864.000	1.531.797.690	98,77	98,77	1.600.000.000	1.259.214.690	78,70	78,70	2.725.000.000	1.125.000.000	70,31	216,40	216,40
Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengawasan Mayat	5.000.000	2.275.000	45,50	45,50	5.000.000	3.160.000	63,00	63,00	0	-48.422.000	(2,56)	197,95	197,95
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	1.305.794.000	87,05	87,05	1.894.257.000	932.466.000	49,23	49,23	1.845.835.000	1.156.935.000	117,46	228,50	228,50
Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.500.000	1.316.078.600	103,42	103,42	965.000.000	937.386.292	96,17	96,17	2.141.935.000	1.156.935.000	117,46	228,50	228,50
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus	2.000.000.000	2.272.882.000	113,64	113,64	2.200.000.000	1.795.729.000	81,62	81,62	2.123.000.000	-77.000.000	-3,63	100,00	100,00
Retribusi Pelayanan ToraTora Ulang	7.000.000	8.169.500	116,71	116,71	10.000.000	8.187.800	81,88	81,88	0	-270.400.000	(100,00)	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000	459.680.000	183,87	183,87	270.400.000	114.920.000	42,50	42,50	0	-270.400.000	(100,00)	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	232.000.000	177.292.800	76,42	76,42	182.000.000	122.728.600	67,43	67,43	371.360.000	189.360.000	104,04	302,59	302,59
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Persewaan	9.800.000.000	8.941.077.094	91,24	91,24	6.700.000.000	6.649.246.286	99,24	99,24	14.503.000.000	7.803.000.000	116,46	218,11	218,11
Retribusi Terminal	182.500.000	190.204.000	104,22	104,22	254.646.000	140.768.000	55,28	55,28	0	-254.646.000	(100,00)	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000	1.542.614.000	77,14	77,14	3.563.776.000	924.361.000	26,94	26,94	2.588.165.000	-975.611.000	(27,38)	280,00	280,00
Retribusi Tempat Potong Hewan	240.000.000	241.040.000	100,43	100,43	218.000.000	183.932.000	84,37	84,37	235.000.000	17.000.000	7,80	127,76	127,76
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.800.000.000	27.746.558.055	96,34	96,34	32.842.160.000	19.290.235.179	58,74	58,74	29.930.000.000	-2.912.160.000	(8,87)	155,18	155,18
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	80.000.000	73.650.585	92,31	92,31	80.000.000	53.608.965	67,26	67,26	74.500.000	-5.500.000	(6,88)	138,45	138,45
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	180.000.000	174.393.645	96,89	96,89	600.000.000	484.714.818	80,79	80,79	500.000.000	-100.000.000	(16,67)	0,00	0,00
Retribusi Izin Tempak untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	34.170.000	29.220.000	85,51	85,51	35.020.000	24.219.000	69,16	69,16	0	-35.020.000	(100,00)	0,00	0,00

Uraian	APBD-P Tahun Anggaran 2022			%	APBD-P Tahun Anggaran 2023			%	Target RAPBD Tahun Anggaran 2024			Selisih Target APBD-P TA 2023 dan Target RAPBD TA 2024		% Selisih Target APBD-P TA 2023 dan Target RAPBD TA 2024	% dari Target RAPBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD-P TA 2023 per 10 Nov 2023
	Target	(Rp)	Realisasi		Target	(Rp)	Realisasi Per 10 Nov 2023		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diusulkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.505.000.000	6.641.291.925	88,48	8.307.425.308	8.363.843.874	100,66	8.307.425.308	9-8-5	0	0,00	118-6				
Hasil Penjualan Aset Lainnya	29.798.865.194	27.922.483.892	93,70	23.504.880.538	18.483.713.884	78,64	33.083.308.293	9-5-8-27-755	0	0,00	178,88				
Hasil Sewa BMD	214.186.000	35.900.000	16,76	214.186.000	126.904.400	60,18	214.186.000		0	0,00	166,16				
Hasil dan Bangun Guna Sedia	345.000.000	542.229.200	157,17	1.165.000.000	124.229.500	10,66	335.000.000								
Jasa Giro	722.000.000	90.562.849	12,54	8.045.447	8.045.447	100,00	0								
Pendapatan Bunga	4.650.000.000	2.639.172.489	56,76	1.650.000.000	1.058.278.489	64,14	1.650.000.000	0	0,00	155,91					
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.750.000.000	4.244.628.513	73,82	2.250.000.000	1.576.107.944	70,05	2.250.000.000	0	0,00	142,78					
Penerimaan Komisi, Royongan, atau Bentuk Lain	0	6.000.000		4.200.000	4.200.000	100,00	0	4.200.000	(100,00)	0,00					
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	142.636.531		27.803.418	37.427.280	133,15	0	-27.883.418	(100,00)	0,00					
Pendapatan Denda Pajak Daerah	125.000.000	334.802.457	267,84	349.245	3.646.951	1044,24	0	-349.245	(100,00)	0,00					
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	180.043.745		150.000.000	290.493.463	193,66	150.000.000	0	0,00	0,00					
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	6.71.001.216		0	123.696.164		0	0	#DIV/0!	0,00					
Pendapatan dari Pengembalian	2.554.417.426	2.863.715.364	104,28	2.000.000	2.000.000	100,00	12.074.676.489	12.072.676.488	603633,82	603733,82					
Pendapatan BLUD	15.438.301.788	16.155.511.364	104,65	874.183.455	1.173.438.526	134,23	15.000.000	-859.183.455	(98,28)	1,28					
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	24.400.000	0,00	17.131.407.973	12.021.612.337	70,17	16.374.445.805	-756.962.168	(4,42)	136,21					
Treasury Deposit Facility	0	0		27.625.000	46.875.000	169,88		-27.625.000	(100,00)	0,00					
Pendapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP	0	0		0	1.882.996.283	0,00	0	0		0,00					

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.110.644.633.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp.16.480.700.000.
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp.9.249.300.000.
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp.500.000.000.
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp.750.000.000.
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp5.905.000.000.
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp.200.000.000.
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp.350.000.000.
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp5.124.355.367.
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp15.551.289.266.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.679.136.250.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp9.477.111.250 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.641.341.250.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp2.725.000.000.
 - c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.845.835.000.
 - d) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.141.935.000.
 - e) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus Rp.2.123.000.000.

Apabila masih ada pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang masih dicatatkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada obyek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada obyek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- 2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp47.702.025.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp371.360.000.

- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp14.503.000.000.
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp2.588.165.000.
 - d) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp235.000.000.
 - e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Rp29.930.000.000.
 - f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp74.500.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp500.000.000 dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling

sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - (ii). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - (v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 30 November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi sebesar Rp100.907.096.580,34 atau 73,43% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp137.413.209.479 yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp42.417.737.398 atau 79,12% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp53.610.644.633.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp33.852.614.999 atau 65,11% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.990.259.000.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.307.425.308.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Bukittinggi yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus lebih mengaktifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.063.308.293, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp214.186.000.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.335.000.000.
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp.720.000.000
- 4) Jasa Giro sebesar Rp1.650.000.000
- 5) Pendapatan Bunga sebesar Rp2.250.000.000.
- 6) Pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp150.000.000.
- 7) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp12.074.676.488
- 8) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp15.000.000.

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp603.573.933.271 atau 80% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp569.883.484.530 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp562.729.369.530 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp11.350.416.000.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp451.726.253.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp33.259.715.530.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp66.392.985.000.
- 2) Insentif Fiskal sebesar Rp7.154.115.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Antar Daerah merupakan bagi hasil pajak sebesar Rp33.690.448.741.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana

diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Bukittinggi sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
	APBD 2024	Surat Resmi Kemendagri	
PENDAPATAN DAERAH			0.00
PENDAPATAN TRANSFER			0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569,883,484,530.00	569,883,484,530.00	0.00
Dana Perimbangan	562,729,369,530.00	562,729,369,530.00	0.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11,350,416,000.00	11,350,416,000.00	0.00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	663,958,000.00	663,958,000.00	0.00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6,927,738,000.00	6,927,738,000.00	0.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133,689,000.00	133,689,000.00	0.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	628,378,000.00	628,378,000.00	0.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	49,347,000.00	49,347,000.00	0.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	1,873,495,000.00	1,873,495,000.00	0.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,073,811,000.00	1,073,811,000.00	0.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	451,726,253,000.00	451,726,253,000.00	0.00
DAU	451,726,253,000.00	451,726,253,000.00	0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33,259,715,530.00	33,259,715,530.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PALD	1,748,189,000.00	1,748,189,000.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4,033,323,000.00	4,033,323,000.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4,103,939,000.00	4,103,939,000.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	854,701,000.00	854,701,000.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stuntin	99,950,000.00	99,950,000.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22,419,613,530.00	22,419,613,530.00	0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	66,392,985,000.00	66,392,985,000.00	0.00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	21,547,380,000.00	21,547,380,000.00	0.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	29,769,334,000.00	29,769,334,000.00	0.00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	413,525,000.00	413,525,000.00	0.00
DAK Non Fisik BOP PAUD	2,287,500,000.00	2,287,500,000.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	909,640,000.00	909,640,000.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
DAK Non Fisik Dana BOK BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota	2,828,038,000.00	2,828,038,000.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	427,331,000.00	427,331,000.00	0.00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00
DAK Non Fisik-BURKB-Bantuan Operasional Kesehatan	4,004,721,000.00	4,004,721,000.00	0.00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	401,245,000.00	401,245,000.00	0.00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	1,848,271,000.00	1,848,271,000.00	0.00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406,000,000.00	406,000,000.00	0.00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	7,154,115,000.00	7,154,115,000.00	0.00
Dana Desa			0.00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			0.00

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam agar menyesuaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp806.734.447.755.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp631.426.957.000 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	724.724.754.840
Belanja Pegawai	345.006.638.314
Belanja Barang dan Jasa	315.348.047.150
Belanja Subsidi	2.500.000.000
Belanja Hibah	58.505.069.376
Belanja Bantuan Sosial	3.365.000.000
BELANJA MODAL	71.409.072.915
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.609.009.363
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.152.035.600

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.060.413.952
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.587.614.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Jumlah Belanja	806.734.447.755

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp29.065.989.200 atau 16% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp179.568.375.457. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp12.644.610.400, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp9.682.000.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.

- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sebesar Rp6.739.378.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum dianggarkan, agar dianggarkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar **Rp7.920.460.000 agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar **Rp105.006.000 agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar **Rp3.299.338.000, agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar **Rp103.885.000, agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari

- guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp4.146.358.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, **Rp0 atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggarannya mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan

Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
 - a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp592.790.700 atau 0,6% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp93.715.771.795 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp28.908.400 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4).
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp54.594.300, **harus ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp30.000.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTRM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi sebesar Rp30.000.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A

merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp14.647.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp20.000.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas

alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

- b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp30.000.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp28.993.000, **harus ditingkatkan** anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp28.765.000, **harus ditingkatkan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp19.344.500, **harus ditingkatkan** anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp19.999.900 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai

- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim untuk pemenuhan target layanan bagi masing-masing target 100% SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.*

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp319.878.500 atau 1,3% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.232.352.243. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp32.573.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp287.304.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp287.948.800 atau 0,6% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.334.794.782 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar **Rp146.556.500, agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar **Rp0**

belum dianggarkan, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

- a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp817.790.800 atau 16,7% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.884.659.876. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp817.790.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp1.541.548.030 atau 19% dari total belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp7.997.951.800. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.484.164.330, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar **Rp57.383.700, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar **Rp0 belum dianggarkan, agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp287.948.800 atau 1,4% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp20.276.001.601. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebesar Rp287.948.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Kctertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp839.762.900 atau 8% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp.11.183.381.847 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp633.065.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp839.762.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh

layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota
Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	45,317,600,681	5.62%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0	0,00%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	164,464,214,093	20.39%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	54,334,262,598	6.74%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	35,816,841,438	4.44%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	24,845,256,980	3.08%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	481,956,271,965	59.74%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	806,734,447,755	100.00%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2024 **sudah selaras** dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua)

Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		[Rp]	(%)
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	142.794.672.540	17,70%
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	76.330.057.736	9,46%
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3.885.640.844	0,48%
4.	Meningkatkan usaha Perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	24.555.672.170	3,04%
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	17.737.144.617	2,20%
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	51.160.452.038	6,34%
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	490.270.807.810	60,77%
Total Belanja Daerah		806.734.447.755	100%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan prioritas provinsi Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Rasio Terhadap	
		APBD 2024	Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	56.967.566.608	7,06%
2.	Peningkatan Sektor Pendidikan	65.115.889.500	8,07%
3.	Peningkatan Sektor Kesehatan dan Lingkungan	88.491.541.812	10,97%
4.	Peningkatan kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga	27.406.243.625	3,40%
5.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	490.165.181.710	60,76%
6.	Pengembangan Sosial kemasyarakatan	74.640.875.756	9,25%
7.	Pengembangan Sektor Pertanian	3.947.148.744	0,49%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		806.734.447.755	100,00%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2024 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel prioritas **Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.**

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 200.978.790.831 atau 24,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp806.734.447.755, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut:

(Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp287.536.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah	
		APBD 2023	APBD 2024
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	178.490.554.862	179.568.375.457
	1) Belanja Operasi:	164.314.582.562	156.825.564.257
	a. belanja pegawai:	114.114.301.146	113.644.195.057
	b. belanja barang dan jasa:	36.802.981.416	30.610.729.200
	c. belanja hibah:	13.397.300.000	12.105.640.000
	d. belanja bantuan sosial:	0	465.000.000
	2) Belanja Modal:	14.175.972.300	22.742.811.200
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	2.739.189.008	3.153.900.030
	1) Belanja Operasi:	2.739.189.008	3.090.374.100
	a. belanja pegawai:	0	0
	b. belanja barang dan jasa:	1.815.314.008	2.500.374.100
	c. belanja hibah:	923.875.000	590.000.000
	d. belanja bantuan sosial:	0	0
	2) Belanja Modal:	0	63.525.930
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	1.287.768.540	1.164.920.704
	1) Belanja Operasi:	1.222.990.010	1.136.797.854
	a. belanja pegawai:	0	0
	b. belanja barang dan jasa:	1.222.990.010	1.136.797.854
	c. belanja hibah:	0	0
	d. belanja bantuan sosial:	0	0
	2) Belanja Modal:	64.778.530	28.122.850
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	11.549.333.404	7.490.974.640
	1) Belanja Operasi:	11.308.312.604	7.185.210.590
	a. belanja pegawai:	0	0
	b. belanja barang dan jasa:	8.305.312.604	4.319.850.590
	c. belanja hibah:	3.003.000.000	2.865.360.000
	d. belanja bantuan sosial:	0	0
	2) Belanja Modal:	241.020.800	305.764.050
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	13.505.220.000	13.847.720.000
	1) Belanja Transfer:	9.450.620.000	9.600.620.000
	Belanja bantuan keuangan pada Badan Keuangan	9.450.620.000	9.600.620.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	4.054.600.000	4.247.100.000
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	203.517.465.814	200.978.790.831
3	Total Belanja Daerah	833.948.428.755	806.734.447.755
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	24,40%	24,91%

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 serta kedepannya secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota Bukittinggi sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp134.396.539.041 atau 22,24% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp604.226.156.212.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
- 3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*;
- c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- e) penguatan jejaring layanan primer; dan
- f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan *agar terus ditingkatkan* di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi *agar konsisten meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.*

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting*

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp2.856.394.000 atau 2,13% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp134.396.539.041.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun 2024 sudah memuat arah kebijakan penanganan *stunting* sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan *stunting* sebesar Rp2.856.394.000 atau sekitar 0,34% dari total belanja dalam Rancangan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Kota Bukittinggi agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan *stunting*, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

- (1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- (2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses

layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.

- (3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.595.545.555 atau 21,78% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp797.133.827.755 dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)		
		APBD 2023	APBD 2024	SELISIH
1.	Total Belanja Daerah	833.948.428.755	806.734.447.755	(27.213.981.000)
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa :	9.450.620.000	9.600.620.000	150.000.000
a.	belanja bagi hasil			
b.	belanja bantuan keuangan	9.450.620.000	9.600.620.000	150.000.000
3.	Selisih (1 - 2)	824.497.808.755	797.133.827.755	(27.363.981.000)
	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	329.799.123.502	318.853.531.102	(10.945.592.400)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.595.545.555 dengan rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)		
		APBD 2023	APBD 2024	SELISIH
1.	a) Belanja Modal	79.811.700.656	99.186.334.535	19.374.633.879
	1) Tanah	202.800.000		(202.800.000)
	2) Peralatan Dan Mesin	10.378.812.823	23.808.714.963	13.429.902.140
	3) Bangunan dan gedung	35.834.776.833	40.152.035.600	4.317.258.767
	4) Jalan, Irigasi dan Jerngan	19.820.890.000	10.060.413.952	(9.760.476.048)
	5) Aset Tetap Lainnya	13.574.421.000	4.587.614.000	(8.986.807.000)
	6) Aset lainnya			
	b) Belanja Pemeliharaan	23.566.988.002	20.577.556.020	(2.989.431.982)
	Jumlah 1 = (a + b)	103.378.688.658	119.763.890.555	16.385.201.897
2.	a) Belanja Hibah	23.013.631.454	43.766.035.000	20.752.403.546
	b) Belanja bantuan Sosial	3.667.500.000	465.000.000	(3.202.500.000)
	c) Belanja bantuan Keuangan	9.450.620.000	9.600.620.000	150.000.000
	Jumlah 2 = (a + b + c)	36.131.751.454	53.831.655.000	
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	139.510.440.112	173.595.545.555	34.085.105.443

Pemerintah Kota Bukittinggi **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten dan mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Bukittinggi (di luar gaji dan tunjangan) sebesar Rp1.881.330.900 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Bukittinggi antara lain tercantum pada :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp506.198.000;
- 2) Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp.84.202.700
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp262.223.200;

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus **mengupayakan** dalam mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024.*

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu :
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitas Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi

birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menjadi sebesar Rp1.451.386.400 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kota Bukittinggi **sudah memenuhi** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi harus **mempertahankan dan konsisten** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Bukittinggi dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran

dimaksud pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bukittinggi sebesar Rp2.504.061.150 atau 0,3% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bukittinggi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bukittinggi sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing sebesar Rp1.300.104.100 atau 0,2% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp419.835.600 atau 0,1% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Bukittinggi **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna

mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp743.288.148.244 atau 93,66% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp793.578.827.755 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini *sudah memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan mercalisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Wali Kota Bukittinggi:

- (a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah;
 - (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - (3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP.

- (c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:
- (1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
 - (2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
 - (3) melaksanakan *E-purchasing* melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp724.724.754.840 atau 90% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp806.734.447.755, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp345.006.638.314 atau 43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp314.823.779.314 atau 39.02% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp202.508.291.543 atau 25% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp10.920.508.036.
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi sebesar Rp.360.885.173.
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.089.591.837.
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.992.832.
 - e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp133.661.
 - f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp400.982.
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp.57.000.000.
 - h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp1.500.000.
 - i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.500.000.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)h)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp11.717.884.954.
 - (1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.896.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.636.310.954.
 - (3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp908.000.000.
 - (4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.1.971.000.000
 - (5) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp2.463.000.000.
 - b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp250.000.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp79.242.109.455 atau 10% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp39.316.151.595.
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp39.925.957.860.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp43.526.016.972.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP

bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir C.3.a.1)h)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp29.769.334.000.

8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp413.525.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.vii)(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp2.668.032.231 atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.110.644.633 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp2.044.759.818.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp623.272.413.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.315.575.978 atau 2,28% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, di luar Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp57.679.136.250 yang diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp820.675.978.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp494.900.000.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 10) Belanja Honorarium sebesar Rp9.426.672.176 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
 - a) Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan sebesar Rp.8.885.394.676.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.502.277.500.
 - c) Belanja Honorarium Perangkat UKPBJ sebesar Rp.39.000.000.
- 11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp1.043.850.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
 - a) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp1.043.850.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan perubahannya serta butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kota Bukittinggi dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar Rp315.348.047.150 atau 39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang sebesar Rp48.397.621.336 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp48.245.847.696, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp49.537.900.
 - b) Belanja bahan kimia sebesar Rp738.206.920.

- c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp680.600.300.
- d) Belanja Bahan Bahan Baku sebesar Rp5.469.000.
- e) Belanja bahan bahan bibit tanaman sebesar Rp460.109.250.
- f) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp298.721.950.
- g) Belanja suku cadang alat angkutan sebesar Rp8.300.400.
- h) Belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp67.693.700.
- i) Belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp127.947.794.
- j) Belanja suku cadang alat bengkel sebesar Rp7.134.800.
- k) Belanja suku cadang lainnya sebesar Rp3.720.000.
- l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp4.470.035.571.
- m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp820.741.403..
- n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp594.701.450.
- o) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -benda pos Rp124.220.000.
- p) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor persediaan dokumentasi/administrasi tender Rp3.000.000.
- q) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp978.361.750.
- r) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp1.718.287.788.
- s) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp475.790.150.
- t) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebesar Rp1.575.012.100.
- u) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa sebesar Rp45.000.000.
- v) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olah raga sebesar Rp169.955.320.
- w) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp1.166.668.000.
- x) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp62.303.100.
- y) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp244.745.600.
- z) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp10.530.194.400.
- aa) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp1.791.434.100.
- ab) Belanja Natura dan pakan-pakan Rp2.892.955.150.
- ac) Belanja natura dan pakan natura dan pakn lainnya sebesar Rp96.170.000.
- ad) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp10.964.005.500.
- ae) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp3.299.364.200.
- af) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan Rp1.102.000.000.

- ag) Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan Rp999.396.000.
- ah) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebesar Rp515.000.000.
- ai) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp132.000.000.
- aj) Belanja Pakaian Dinas Lapangan sebesar (PDL) Rp501.552.400.
- ak) Belanja Batik Tradisional sebesar Rp87.300.000.
- al) Belanja pakaian pakaian olah raga Rp316.650.000.

Penganggarnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2)c)(1)(b), butir C.3.a.2)c)(1)(c) dan butir C.3.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp154.089.533.739 yang antara lain diuraikan :
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp133.637.902.449 yang diuraikan antara lain :
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp7.972.102.800.
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp3.108.670.000.
 - (3) Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara Rp349.200.000.
 - (4) Honorarium rohaniwan sebesar Rp10.500.000.
 - (5) Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola TI dan website sebesar Rp8.400.000.
 - (6) Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi, Kabupaten dan kota sebesar Rp10.750.000.
 - (7) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp37.000.000.
 - (8) Honorarium TAPD sebesar Rp. 900.800.000.

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun

Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (9) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp15.794.760.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp6.314.000.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp 300.125.000.
- (12) Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana umum Rp4.309.070.000.
- (13) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp9.014.750.000.
- (14) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp703.000.000
- (15) Belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp1.320.000.000.
- (16) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp212.000.000.
- (17) Belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp3.600.666.108
- (18) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp8.087.000.000.
- (19) Belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp1.098.000.000.
- (20) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp3.828.970.000.
- (21) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp2.487.350.200.
- (22) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp18.849.340.028.
- (23) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp5.972.250.000.
- (24) Belanja jasa tenaga sopir sebesar Rp385.000.000

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan

instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(25) Belanja Tagihan telepon sebesar Rp389.120.000.

(26) Belanja Tagihan Air sebesar Rp1.426.180.000.

(27) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp7.843.870.000.

(28) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp680.200.000.

(29) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp3.509.905.000.

Penganggarnya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp12.602.699.266 yang diuraikan :

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp6.867.732.766.

(2) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp2.400.260.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan

kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.207.625.600.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp581.048.400.

(5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp521.032.500.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.848.543.000.

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp663.300.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan

kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp718.000.000.
- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp558.000.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.463.473.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25.885.362.995 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.229.443.591.
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.509.819.404.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.146.100.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan

kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp53.001.744.878 yang diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp52.301.744.878 dan Perjalanan Dinas Luar negeri sebesar Rp700.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya alokasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas harus **dirasionalkan dan dikurangi** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Bukittinggi agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (di luar gaji dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota*

Bukittinggi, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.877.975.000 yang diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp8.000.000.000.
- 2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp6.992.750.000.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar 2.000.000.000.
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar 4.554.630.00

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp21.547.380.000 **lebih kecil** dari alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.894.520.000. Hal ini **belum sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp5.668.787.483.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp8.095.809.202.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp1.909.849.120.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp600.000.000.
- 5) Belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp100.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp16.374.445.805, **sesuai** bila dibandingkan target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.374.445.805. **Sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar Rp58.505.069.376 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp15.575.186.850.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp35.201.485.000.
- 3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp735.647.526.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Bukittinggi telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Bukittinggi baru sebesar Rp33.612.265.430 atau 4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah Kota Bukittinggi wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp735.647.526 atau 0,1% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah

untuk KPU Kota Bukittinggi sebesar Rp9.823.152.850 atau 71% dari total NPHD sebesar Rp13.823.152.850 dan Bawaslu Kota Bukittinggi sebesar Rp3.167.409.000 atau 69% dari total NPHD sebesar Rp4.567.409.000.

*Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Bukittinggi Tahun 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi **sudah memenuhi** alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Bukittinggi sebesar sisa total kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kota Bukittinggi.*

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp71.409.072.915 atau 9% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **C.3.b.1), C.3.b.2)** dan butir **C.3.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Bukittinggi sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **C.3.b.7), C.3.b.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp400.000.000
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.777.497.278 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :

- 1) Belanja modal Alat Besar Rp1.231.453.460
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp2.408.119.600
 - 3) Belanja modal Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp6.528.000
 - 4) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp7.431.700
 - 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.235.732.450
 - 6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp251.340.546
 - 7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp1.608.000.287
 - 8) Belanja modal alat laboratorium Rp164.810.000
 - 9) Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.785.744.200
 - 10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp2.000.000.000
 - 11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.909.849.120
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.152.035.600.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp10.060.413.952 ,yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp6.026.235.600.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp2.273.670.000.
 - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp868.816.000.
 - 4) Belanja Modal jaringan sebesar Rp791.692.352.
 - 5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp100.000.000
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.587.614.000.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.608.000.287.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp164.810.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000 atau 0,1% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **C.3.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000.000, sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD-P Tahun Anggaran 2022		APBD-P Tahun Anggaran 2023				Target RAPBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD-P TA 2023 dan Target RAPBD TA 2024	% Selisih Target APBD-P TA 2023 dan Target RAPBD TA 2024	% dari Target RAPBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD-P TA 2023 per 10 Nov 2023
	(Rp)		(Rp)							
	Target	Realisasi	Target	Realisasi Per 10 Nov 2023						
1	2	3	4-3-2	5	6	7-6-5	8	9-8-5	10-9-5	11-8-6
Penerimaan Pembiayaan	132.987.559.855	132.979.000.891	99,99	77.322.187.688	77.322.187.688	100,00	50.000.000.000	(27.322.187.688)	(35,34)	64,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.987.559.855	132.979.000.891	99,99	77.322.187.688	77.322.187.688	100,00	50.000.000.000	(27.322.187.688)	(35,34)	64,66
Pelampauan Penerimaan PAD	0	0		0	0			0		
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	0		0	0					
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0		0	0					
Penghematan Belanja	132.987.559.855	132.987.559.856	100,00	77.322.187.688	77.322.187.688	100,00	50.000.000.000	27.322.187.688	35,34	64,66
Sisa Belanja Lainnya	0	0		0	0					
Koreksi SilPa	0	(8.558.965)								
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	0	0					
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	0	0					

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000.

Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada penghitungan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a/1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Bukittinggi *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a/3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a/4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Bukittinggi *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a/3/6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	RKPD 2024	KUA-PPAS 2024	APBD 2024
1.	Jumlah Program	137	131	131	130
2.	Jumlah Kegiatan	-	252	252	251
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	660	660	670
4.	Jumlah Anggaran (Rp)	1.224.320.280.000	990.013.377.565	855.700.857.315	806.734.447.755

Jumlah program sebanyak 130, jumlah kegiatan sebanyak 251 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 670 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD TA. 2024 **belum sesuai** dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024.

*Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat Sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pendidikan:

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2. Dinas Kesehatan:

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

- g. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- h. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- i. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- j. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- k. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- l. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3. UPTD Puskesmas :
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
 - a. Semua sub kegiatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
- 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota
 - c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - f. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - g. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - h. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - i. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - j. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - k. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - l. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - m. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - n. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - o. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
 - p. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - q. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran
 - r. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - c. Pengawasan Penanaman Modal
7. Dinas Perhubungan
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
 - b. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
9. Sekretariat Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Kelurahan
 - a. Sub-sub kegiatan pada Kelurahan

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 **belum** berpedoman pada RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RKPD pada Tahun 2024 Rp 990.013.377.565 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp806.734.447.755; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RKPD pada Tahun 2024 sejumlah 131 program, sesuai dengan jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 130 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Bukittinggi Tahun 2024-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - b. pemeliharaan anak-anak terlantar;

- c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
 - d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;
 - b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.
 3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
 4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- C. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024. *Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan.* Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Bukittinggi menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2024 antara Wali Kota Bukittinggi dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi.
- D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.

- E. Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- F. Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Wali Kota Bukittinggi agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat. Untuk itu diminta Wali Kota Bukittinggi menyiapkan dan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHVELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Hans	Sekretaris Daerah	21/11	f
2		Asisten Administrasi Umum		
3	Ronali A.P.	Kepala BPKAD	21/11	cl.
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	19/11	d
5	Afrizal Umar	Kasubid	19/11	g